



KR-Antara/Irfan Sumanjaya

KAMPUNG MATTI DI SEMERU: Seorang warga melihat kondisi rumah miliknya yang tidak ditempati di Desa Supiturang, Lumajang, Jawa Timur, Jumat (29/12/2023). Sedikitnya 547 kepala keluarga (KK) penyintas erupsi Semeru pada tahun 2021 hingga sekarang memilih meninggalkan wilayah tersebut karena berada dalam zona merah atau daerah rawan bencana alam.

Pemerintah Integrasikan Digitalisasi Birokrasi

JAKARTA (KR) - Pemerintah tengah berupaya menyatukan atau mengintegrasikan digitalisasi birokrasi atau sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dari setiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di Indonesia.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengemukakan hal itu usai melaporkan perkembangan digitalisasi birokrasi kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/12).

"Selama ini pemda punya aplikasi, kementerian a, b, c dan d punya aplikasi, sehingga izin yang dikerjakan atau urusan sesuatu sangat banyak. Ke depan ini tidak lagi terjadi. Akan disatukan, sehingga tidak lagi bertumpuk," tandas Menpan Azwar Anas.

Selama ini, katanya, pelaksanaan SPBE sudah memiliki pondasi kebijakan maupun pondasi tata kelola. "Kita punya Perpres SPBE,

punya Perpres Arsitektur SPBE, Perpres Satu Data Indonesia, dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi untuk dari sisi fondasi kebijakan. Dari fondasi tata kelolanya, kita sudah ada tim koordinasi SPBE, tim arsitektur SPBE, kemudian ada capaian di beberapa kementerian/lembaga," jelasnya.

Namun, kata Azwar, ada kesulitan mengintegrasikan layanan pemerintahan di kementerian/lembaga. Oleh karena itu, Presiden menerbitkan Perpres No 82 Tahun 2023 yang mengatur percepatan pelaksanaan digitalisasi.

"Isinya memperkuat tata kelola melalui keterlibatan kementerian koordinator. Jadi, para menko diperintahkan untuk 'memaksa' da-

lam tanda kutip kepada kementerian/lembaga untuk mengikuti arsitektur SPBE, termasuk mendorong portal satu layanan di setiap kementerian/lembaga," katanya.

Selain itu, penerbitan perpres juga untuk membangun kemampuan implementasi *government technology* (govtech) atau teknologi pemerintahan dan fokus pada integrasi layanan. Menurut Azwar, Pemerintah akan fokus di sembilan layanan prioritas, yakni identitas digital dasar (digital ID seperti kartu tanda penduduk).

Presiden ingin masyarakat tidak disulitkan lagi dengan urusan mencetak KTP guna memperoleh pelayanan. Berikutnya terkait dengan platform pertukaran data, karena selama ini kementerian/lembaga kaya akan data, namun tak bertukar, sehingga manfaatnya belum optimal untuk masyarakat.

Selanjutnya pembayaran digital. Saat ini, ujarinya, sudah berjalan di hampir semua pemerintahan dari

pusat hingga daerah. Selain itu, pelayanan publik portal satu data. Dalam hal ini Presiden meminta portal layanan dibuat berdasarkan kebutuhan. "Misalnya, di Estonia itu langsung bagaimana cara melahirkan, bagaimana saya menikah, bagaimana asuransi saya. Jadi, langsung ke urusan masing-masing, tidak lagi ke sektoral. Ini nanti akan dilakukan rapat kabinet paripurna oleh Bapak Presiden," terang Azwar.

Pemerintah juga akan membuat portal administrasi pemerintahan agar sistem keuangan dan sistem pemerintahan tidak terlampaui banyak.

"Kemarin SIPD (sistem informasi pemerintahan daerah) sudah kita resmikan. Lebih dari 500 layanan, cukup satu layanan. Kemudian SIM online, lalu bantuan sosial atau di Kementerian Sosial, kesehatan di Kementerian Kesehatan, dan pendidikan di Kementerian Pendidikan," ujar Azwar. **(Ant)-d**

DEBAT CAPRES 7 JANUARI 2024

Perlu Bahas Rentannya Korupsi Alpalhankam

JAKARTA (KR) - Pengamat militer Anton Aliabbas berharap debat ketiga capres Pemilu 2024, yang akan berlangsung 7 Januari 2024, dapat membahas rentannya korupsi di proyek pengadaan alat peralatan pertahanan dan keamanan atau alpalhankam.

"Dalam dua kali survei risiko korupsi di sektor pertahanan, yang dilakukan Transparency International, Indonesia masuk dalam kategori tingkat risiko korupsi yang tinggi," kata Anton di Jakarta, Jumat (29/12).

Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) itu menjelaskan, dalam laporan Government Defence Integrity Index tahun 2015 dan 2020, Indonesia tetap masuk dalam kategori D atau berisiko tinggi korupsi.

"Pengadaan alpalhankam, yang sering dikaitkan dengan kerahasiaan dan sensitif, telah menjadikan sektor ini rawan korupsi," jelasnya.

Oleh karena itu, lanjut Anton, pemberantasan korupsi di sektor pertahanan keamanan menjadi isu krusial untuk dibahas dalam debat capres mengingat tidak ada satupun dokumen visi dan misi peserta Pilpres 2024 yang menyinggung isu tersebut. Tema debat ketiga capres Pemilu 2024 yakni tentang pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik.

Pada 12 Desember debat pertama capres Pemilu 2024 telah diselenggarakan di Kantor KPU RI Jakarta. Kemudian, debat kedua cawapres Pemilu 2024 di JCC Senayan, 22 Desember 2023. **(Ant)-d**

11.828 TERSANGKA NARKOBA DITANGKAP

Fredy Pratama Dilindungi Gangster Thailand



KR-Antara/Reno Esnir

Polisi merapikan barang bukti narkotika saat penangkapan kasus narkotika di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (29/12/23).

menangkap Fredy Pratama. "Kami tetap melakukan kerja sama dengan polisi Thailand. Bahkan, sekarang kami sudah join dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk melakukan gabungan antara BNN, Bareskrim, Bea Cukai, Kepolisian Thailand, Divhubintern, Bea Cukai dari Thailand, dan Interpol," kata

Mukti.

Sementara itu Satgas Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Polri telah menangkap 11.828 orang tersangka tindak pidana narkotika selama periode September hingga 29 Desember 2023.

"Hari ini sesuai atensi dari Bapak Presiden Joko Widodo

dan Bapak Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, kami Satgas Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Polri sejak dibentuk September 2023 sampai dengan akhir Desember 2023, selama periode tersebut Satgas Penanggulangan Narkoba di tingkat Mabes dan jajaran telah berhasil menangkap 11.828 tersangka (tindak pidana narkotika)," kata Kepala Satgas Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P3GN) Polri Polri Irlen Pol Asep Edi Suheri.

Satgas P3GN Polri juga telah mengungkap 11 kasus sejak September hingga Desember 2023. Pengungkapan ini merupakan kerja sama dengan satuan kerja yang lain. "Selama periode 21 September hingga 28 Desember 2023, kami telah mengungkap 11 kasus yang bekerja dengan satker dan instansi lainnya," katanya. **(Ant)-f**

Anies: Gelombang Perubahan Makin Besar

JAKARTA (KR) - Capres Anies Baswedan mengatakan, gelombang perubahan makin besar, bahkan bukan hanya yang lemah, melainkan kelompok mapan pun ikut menyongsong perubahan itu. "Kami sendiri merasakan, yang ingin perubahan makin hari makin besar," kata Anies melalui keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (29/12).

Setelah melakukan kampanye di berbagai daerah, katanya, menunjukkan adanya perubahan yang makin masif. Bahkan, jelasnya, sebelumnya perubahan itu hanya diimpikan kelompok yang lemah. Namun, kali ini kelompok yang mapan dan ekonomi kuat pun ikut masuk dalam perubahan.

"Kalau dulu hanya yang lemah, sekarang kelompok yang mapan, ekonomi kuat juga merasakan ikut perubahan," tuturnya di Kabupaten Tuban.

Anies juga menanggapi hasil survei yang menempatkan paslon nomor urut 1 ini, mengalami tren peningkatan. Menurutnya, yang terpenting adalah proses pada Pilpres 2024 berjalan secara adil.

"Bagi kami yang penting adalah prosesnya berjalan secara adil, independensi penyelenggara dijamin, netralitas dijamin, selebihnya rakyat akan menentukan," katanya.

Anies juga optimistis pada Pilpres 2024 bisa masuk putaran kedua sekaligus dapat memenangi Pilpres 2024. "Insyaallah, masuk putaran kedua," katanya. **(Ant)-f**

TKN Gelar Pertandingan Bola Antartimses

JAKARTA (KR) - Tim Kampanye Nasional (TKN) Fanta Prabowo-Gibran mempromosikan pemilu damai dengan menggelar kompetisi sepakbola mini atau minisoccer antar-tim sukses pasangalon (paslon). "Seperti sebuah prinsip, lawan bertanding adalah kawan berolahraga. Pilihan boleh beda, tetapi anak muda tetap harus solid menjaga persaudaraan," kata Koordinator Fanta Sport Kevin Tandra dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Jumat (29/12).

Kevin mengatakan, acara yang bertempat di B23 Arena Simprug Jakarta Selatan tersebut berjalan lancar. Para tim sukses dari paslon nomor 1 dan paslon nomor urut 3 pun diakui Kevin antusias mengikuti kompetisi minisoccer tersebut. Dengan kegiatan itu, ia berharap situasi ketegangan antar-timses paslon bisa mencair, sehingga pemilu yang damai pun bisa terjadi.

Pada saat yang sama, Ketua TKN Fanta Arief Rosyid Hasan mengatakan, pihaknya tetap mempromosikan pemilu damai, sehingga tidak terjadi perpecahan di tengah masyarakat. "Kami ikut bangga karena sejak awal memang mempromosikan pemilu yang fun dan santuy melalui kampanye gemoy. Kita akan terus promosisikan pemilu damai," jelasnya.

Pada bagian lain, Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko mengatakan, Capres Prabowo akan meningkatkan kapasitas pertahanan siber atau *cyber defense* jika terpilih menjadi presiden pada Pilpres 2024. **(Ant)-f**

Ganjar Gagas Program SMK Gratis

WONOGIRI (KR) - Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo berkomitmen menggagas program sekolah menengah kejuruan (SMK) gratis untuk keluarga tidak mampu ke tingkat nasional guna mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Sebelumnya, Ganjar telah menjalankan program serupa melalui SMKN Jateng semasa menjabat gubernur.

"Jadi, setelah kita lihat praktik yang sudah berjalan di SMKN Jateng untuk keluarga miskin dan mereka langsung bisa bekerja, maka Ganjar-Mahfud berkeinginan untuk menjadikan program itu bisa kita kembangkan secara nasional," kata Ganjar usai menghadiri acara 'Launching SMK Gratis Langsung Kerja untuk Keluarga Miskin' di Lapangan Pule Kabupaten Wonogiri Jateng, Jumat (29/12).

Menurut Ganjar, jika program tersebut dimulai di setiap kabupaten/kota di Indonesia, langkah tersebut secara sistematis dapat mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan kualitas SDM dalam negeri. "Kalau kita mulai tahun pertama di setiap kabupaten/kota yang bisa menyerap keluarga miskin, Insyaallah ini menjadi program yang secara sistematis bisa mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan kualitas SDM kita," ujarinya.

Ganjar menerangkan akan menjadikan program tersebut sebagai prioritas karena lapangan pekerjaan masih dibutuhkan oleh generasi muda. **(Ant)-f**